

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo)

Nadia Ayu Deviani¹, Dr. Rachmawati Novaria, MM², Drs. M. Kendry Widiyanto, M.Si³

^{1,2} Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

³ Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : nova@untag-sby.ac.id

Abstract

The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is a form of government accountability to higher authorities such as the Regent/Mayor/Governor and the community. This system aims to realize the aspirations of the wider community as a prerequisite in realizing Good Governance. As stated in the PAN-RB Ministerial Regulation No. 12 of 2015 then the components in the performance assessment are: 1) Performance Planning; 2) Performance Measurement; 3) Performance Reporting; 4) Performance Evaluation; and 5) Performance Achievements. This research uses a descriptive qualitative approach with 2 (two) research focuses, namely: 1) How is the application of SAKIP in realizing Good Governance at the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in Sidoarjo Regency; 2) What are the factors that hinder its implementation. Data obtained from observations, interviews and documentation at the research site. The results of the study indicate that the implementation of SAKIP has not been implemented optimally because there are 3 (three) principles of Good Governance that have not been achieved in its application, namely Consensus Building, Responsiveness and Equality. Therefore, continuous improvement is needed to make it more optimal.

Keywords: Performance Accountability System for Government Agencies, Good Governance, Cooperatives and Micro Enterprises Service, Sidoarjo Regency.

Abstrak

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada otoritas yang lebih tinggi seperti Bupati/Walikota/Gubernur dan masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat luas sebagai prasyarat dalam mewujudkan *Good Governance*. Sebagaimana yang tertuang pada Permen PAN-RB No. 12 Tahun 2015 maka komponen dalam penilaian kinerja yakni : 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Kinerja; dan 5) Capaian Kinerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 2 (dua) fokus penelitian yaitu : 1) Bagaimana Penerapan SAKIP dalam mewujudkan *Good Governance* pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo; 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapannya. Data didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAKIP belum terlaksana secara optimal dikarenakan terdapat 3 (tiga) prinsip *Good Governance* yang belum tercapai dalam penerapannya yaitu Membangun Konsensus, Responsif dan Kesetaraan. Maka dari itu, diperlukan penyempurnaan secara berkelanjutan agar lebih optimal.

Kata Kunci: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Good Governance, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

Pendahuluan

Pada rentang tahun 1997 hingga 1998, banyak wilayah di benua Asia yang mengalami krisis moneter, yakni suatu keadaan tidak ter kendalinya nilai tukar mata uang sehingga membuat harga barang mengalami kenaikan. Adanya krisis moneter tersebut sangat berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia. Masyarakat pun menuntut lembaga publik khususnya instansi pemerintahan di setiap tingkatan untuk melakukan akuntabilitas (pertanggungjawaban).

Keinginan masyarakat tersebut kemudian diakomodasi oleh pemerintah melalui TAP MPR No. XI/MPR/1998 yang pada isinya diatur sedemikian rupa supaya pemerintah dapat mengimplementasikan negara yang terbebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, atau selanjutnya disebut sebagai SAKIP. Selanjutnya, regulasi mengenai SAKIP telah diatur dalam Perpres No. 29 Tahun 2014. Adapun pembuatan SAKIP bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat luas sebagai prasyarat dalam mewujudkan *Good Governance*.

Good Governance terlahir dari ketidaksetujuan masyarakat akan sistem “*Government*” pada awal 1990-an. Hal itu dikarenakan konsep “*Government*” menuai banyak kritikan karena cenderung meremehkan aspirasi masyarakat. Indonesia pun pada akhirnya mengimplementasikan konsep tersebut melalui program “*Good Governance*” yang menyatu dengan program bantuan seperti *civil society* yang lantas dijadikan lembaga pemerintahan untuk menghadapi delegitimasi sehingga mendominasi arah reformasi birokrasi (Badruzaman & Chairunnisa, 2018). Dalam mewujudkan *Good Governance*, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memfokuskan perhatian pada capaian Indeks *Good Governance* (ICG) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Capaian Indeks *Good Governance* (ICG) dan Indeks Reformasi (ICG)

Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks <i>Good Governance</i> (ICG)	65,35	66,31	67,33	69,32	69,55	70,76
Realisasi						
	65,35	63,69	69,19	74,24		
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			B	B	B	B

Sumber: Bappeda Kabupaten Sidoarjo, 2020

Konsep penelitian ini menggunakan *grand theory* kebijakan publik dari (Nugroho, 2009), implementasi kebijakan publik dari (Grindle, 1980). Sedangkan *applied theory* menggunakan:

A. Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Permen PAN-RB No. 12 tahun 2015) :

- 1) Perencanaan Kinerja
- 2) Pengukuran Kinerja
- 3) Pelaporan Kinerja
- 4) Evaluasi Kinerja
- 5) Capaian Kinerja

B. Prinsip-prinsip *Good Governance* (United Nation Development Programme):

- 1) Partisipasi
- 2) Taat Hukum (Rule of law)

- 3) Transparansi
- 4) Responsif
- 5) Membangun Konsesus
- 6) Kesetaraan
- 7) Efektivitas dan Efisiensi
- 8) Akuntabilitas
- 9) Visi Strategik

C. Faktor penghambat Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan *Good Governance*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dendy Syaiful Akbar (2016) dengan judul “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya)”. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis metode penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, metode yang digunakan yakni kuantitatif dengan melakukan survei menggunakan kuesioner. Sedangkan, pada penelitian ini metode yang digunakan yakni kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perkembangan ekonomi merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional sehingga pemerintah harus akuntabel dalam mengelola institusinya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus penyelewengan yang meresahkan masyarakat dan rakyat Indonesia. Maka dari itu, adanya penerapan SAKIP dalam mewujudkan *Good Governance* ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk bertanggungjawab dalam mengelola institusinya. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan SAKIP dalam mewujudkan *Good Governance* pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apa saja faktor penghambat SAKIP dalam mewujudkan *Good Governance* pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo ?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Fokus penelitiannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis penerapan SAKIP dalam mewujudkan *Good Governance* serta apa saja faktor yang menghambat dalam penerapannya. Adapun pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan 3 tahapan dari (Miles & Huberman, 2012) yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terkait Penerapan SAKIP Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, maka dapat diuraikan hasil dan pembahasan berikut.

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) :

- a. Perencanaan Kinerja : Penyusunan perencanaan kinerja membutuhkan waktu yang cukup lama namun dapat diselesaikan tepat waktu oleh para pegawai. Selain itu, dalam proses perencanaan strategis terdapat beberapa hambatan seperti adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan dan aplikasi yang digunakan seringkali lambat.
- b. Pengukuran Kinerja : Pengukuran kinerja telah terlaksana dengan baik. Kinerja diukur berdasarkan realisasi dari target yang telah ditentukan pada awal tahun dan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

- c. Pelaporan Kinerja : Para pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah mengumpulkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan tepat waktu, hal ini dikarenakan adanya target waktu dari pihak terkait.
- d. Evaluasi Kinerja : Hasil evaluasi LAKIP memperoleh kategori “Sangat Baik”. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hasil evaluasi adalah komitmen perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, inovasi kegiatan tiap bidang, keterlibatan para pegawai dalam melaksanakan program serta sarana prasarana yang mendukung
- e. Capaian Kinerja : Capaian kinerja pada Tahun 2021 telah maksimal. Sebagaimana sampai dengan Tahun 2021 kinerja dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui usaha mikro mandiri dan koperasi berkualitas mencapai 100%.

Prinsip-prinsip *Good Governance* :

- a. Akuntabilitas : Pertanggungjawaban kepada publik dan lembaga-lembaga mengenai sasaran dan program melalui LAKIP telah terlaksana dengan tepat waktu. Hal ini dikarenakan Para pegawai mempunyai komitmen dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan.
- b. Transparansi : Para pegawai telah transparan kepada masyarakat dalam menyajikan informasi mengenai sasaran dan target yang telah termuat pada Rencana Strategis (Renstra) OPD.
- c. Kepastian hukum : Kepastian hukum dalam penyusunan SAKIP telah termuat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
- d. Partisipasi : Partisipasi dapat dilihat dari program maupun kegiatan yang sangat melibatkan masyarakat. Salah satu programnya adalah renovasi 2.000 warung rakyat.
- e. Efektivitas dan Efisiensi : Efektivitas dan Efisiensi dapat dilihat dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun anggaran 2021. Realisasi keuangan anggaran sebesar 96,96% yang artinya efisien dalam penggunaan dan efektif dalam melaksanakan 7 (Tujuh) program dan 13 (Tiga belas) kegiatan hingga Desember 2021 telah terealisasi fisik sebesar 100%.
- f. Visi strategik : Visi strategik telah dijelaskan pada rencana strategik yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD yakni sebagai pedoman pelaksanaan selama 5 (lima) tahun kedepan. Semua yang telah dijabarkan merupakan sebagai tujuan tercapainya kinerja yang maksimal bagi OPD.

Faktor Penghambat :

- a. Faktor birokrasi berkaitan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat
- b. Data belum terpusat artinya data yang diolah belum mempunyai basis data terpusat sehingga akan mempengaruhi beberapa hal seperti, minimnya integritas data, keamanan data dan kesulitan mengubah/ mengatur ulang data tersebut.
- c. Kurangnya sumber daya manusia sesuai bidang yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kemampuan pegawai dengan bidangnya.

Penutup

Kesimpulan

1. Penerapan SAKIP Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo masih belum terlaksana secara optimal dikarenakan terdapat 3 (tiga) prinsip *Good Governance* yang belum tercapai dalam penerapannya yaitu Membangun Konsensus, Responsif dan Kesetaraan.
2. Adapun faktor penghambat yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya adalah :
 - 1) Faktor birokrasi berkaitan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menganggap birokrasi sebagai alat untuk menindas mereka.

- 2) Data belum terpusat artinya data yang diolah belum mempunyai basis data terpusat sehingga akan mempengaruhi beberapa hal seperti, minimnya integritas data, keamanan data dan kesulitan mengubah/mengatur ulang data tersebut.
- 3) Kurangnya sumber daya manusia sesuai bidang yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kemampuan pegawai dengan bidangnya.

Saran

1. Untuk mengoptimalkan prinsip *Good Governance* dapat dilakukan beberapa hal yaitu meningkatkan keterlibatan perwakilan dari masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dan memanfaatkan media sosial untuk mensosialisasikan terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
2. Untuk faktor penghambatnya dapat dilakukan beberapa hal juga yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengadakan program yang aktif melibatkan masyarakat, mengupayakan adanya sistem database terpusat agar pengolahan data oleh para pegawai lebih cepat dan mudah serta mengupayakan adanya manajemen sumber daya manusia melalui perbaikan obyektivitas pada proses rekrutmen pegawai.

Daftar Pustaka

- Badruzaman, J., & Chairunnisa, I. (2018). PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi*.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2012). *Qualitative Data Analysis (A Sourcebook Of Methode)*.
- Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.